

DIDUGA JADI TEMUAN BPK, GAJI 58 PEGAWAI DUKCAPIL BIMA SENGAJA DISTOP SEMENTARA

Kliping Berita



Suryadin (Dok. Lombok Post)

LombokPost--Puluhan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bima harus bersabar.

Gaji mereka dalam dua bulan terakhir, Mei hingga Juli ini belum dibayar.

Informasi yang dihimpun, pencairan gaji 58 pegawai setempat sengaja tak disetujui Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Bima.

Karena ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi NTB, sehingga gaji mereka ditahan untuk sementara waktu.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bima Salahudin membenarkan gaji 58 pegawainya belum dibayar pemerintah sejak Mei lalu.

Kondisi ini bukan hanya terjadi di Dukcapil, tapi juga dialami oleh ratusan pegawai di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di Pemda Bima.

"Iya benar ada 58 pegawai yang belum terima gaji di Dukcapil. Buka hanya di Dukcapil, tapi semua pegawai di Kabupaten Bima, Dukcapil salah satunya," kata dia, Rabu (7/8).

"Terkait alasannya, Salahudin memilih irit bicara dan mengaku sama sekali tidak tahu persis.

Dia menyarankan mengenai hal ini agar wartawan langsung konfirmasi ke pihak yang menangani keuangan daerah.

"Gak tahu alasannya, ke bagian keuangan saja yang tahu soal ini," tegas Salahudin.

Kepala Bagian Prokopim Setda Kabupaten Bima Suryadin membantah gaji puluhan pegawai ditahan karena adanya temuan BPK NTB.

"Bukan karena ada temuan," bantah dia.

Menurut dia, gaji pegawai tak dibayar hingga saat ini karena menunggu pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif. Karena administrasi keuangan memerlukan otorisasi Sekda baru bisa diproses.

"Sekda definitif baru dilantik, sehingga administrasi keuangan yang memerlukan otorisasi Sekda baru bisa diproses," jelas Yan, sapaan akrabnya. (gun/r8)